



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT KERJA : RSUD DR. SAIFUL ANWAR MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAIFULLAH ASMIRAGANI
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR
3. NHK : 766551

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 9.650.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m²/70 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m²/200 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.825.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 194 m²/250 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.925.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 63 m²/60 m² di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m²/150 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 235 m²/200 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m²/145 m² di KAB / KOTA SIDOARJO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 730.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER ULTIMATE Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
3. MOBIL, HONDA HONDA CITY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000



4. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	705.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.310.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.079.555.664
F. HARTA LAINNYA	Rp.	156.000.000
Sub Total	Rp.	14.630.555.664
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	14.630.555.664

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.